

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Pembukaan UUD 1945 Alinea IV menyatakan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Berdasarkan hal itu dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik. Asas kedaulatan rakyat yang dikenal sebagai asas demokrasi, dikenal dalam konstitusi banyak Negara. Meskipun demikian, setiap Negara mempunyai sistem atau mekanisme tersendiri untuk melaksanakan asas tersebut. Sebuah negara yang sistem pemerintahan negara menganut sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Indonesia merupakan negara kesatuan yang memegang teguh ciri-ciri sistem politik demokrasi. Negara Kesatuan Republik Indonesia mencakup wilayah yang luas dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pemerintahan yang dianut NKRI adalah sistem pemerintah presidensial / pemerintahan yang dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh menteri-menteri yang bertanggung jawab pada presiden. Maka, untuk mengakomodir wilayah yang luas dan penduduk yang beranekaragam UUD 1945 juga mengatur adanya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta mengenal adanya otonomi daerah. (UUD 1945).

Dalam otonomi daerah sendiri terdapat lembaga yang terkait dalam menjalankan tugas negara di antaranya adalah DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah). Dalam menjalankan tugasnya DPRD memiliki fungsi, wewenang, hak dan kewajibannya dalam mengatur dan menjalankan kedaulatan negara yang berada di daerahnya sendiri. DPRD harus mampu menjaring aspirasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aspirasi masyarakat adalah harapan dan tujuan dari masyarakat untuk keberhasilan pada masa yang akan datang berkaitan dengan hajat hidup mereka,

baik secara individu maupun secara kelompok. Masyarakat harus dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana dan kebijakan oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan bukan hanya merupakan hasil dari interaksi pemerintah daerah dan DPRD. Dan juga diperlukan penguatan peran kelompok kepentingan dan pers di daerah untuk mendorong DPRD lebih aspiratif. Pasal 53 UU 10/2004 menjamin hak masyarakat dalam memberikan masukan penyusunan kebijakan tanpa memerinci implikasinya bagi pemerintah, karena penjelasan UU. (Natal Kristiono, S.Pd., MH [2015], *Teori dan praktik pemerintahan daerah dan otonomi daerah di indonesia*).

Kota Bukittinggi pernah menjadi ibu kota Indonesia pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Kota ini juga pernah menjadi ibu kota Provinsi Sumatera dan Provinsi Sumatera Tengah. Bukittinggi pada zaman kolonial Belanda disebut dengan Fort de Kock dan dahulunya dijuluki sebagai Parijs van Sumatra. Luas Bukittinggi secara de jure adalah 145,29 km², mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 84 tahun 1999. Namun secara de facto saat ini, Bukittinggi masih seluas 25,24 km² karena sebagian masyarakat Kabupaten Agam menolak perluasan wilayah tersebut. Kota Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Selain sebagai kota perjuangan, Bukittinggi juga terkenal sebagai kota wisata yang berhawa sejuk, dan bersaudara (sister city) dengan Seremban di Negeri Sembilan, Malaysia. (Kominfo Kota Bukittinggi, [2017] *web: bukittinggikota.go.id*)

Jumlah Penduduk Kota Bukittinggi (Jiwa)								
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
113 903	116 075	118 260	120 491	122 621	124 715	126 804	128 783	130 773

Tabel 1.1 Data jumlah penduduk kota bukittinggi

Sumber : <http://www.bps.go.id>

Dengan jumlah penduduk Kota Bukittinggi yang terus meningkat tahun demi tahun. Dan wilayah Bukittinggi yang semakin sempit dengan banyaknya jumlah penduduk yang terus berkembang. Maka kota Bukittinggi memerlukan wadah dan

wilayah yang signifikan untuk perkembangan fasilitas publik. Dengan 3 kecamatan Guguk Panjang , Mandiangi Koto Selayan dan Aur Birugo Tigo Baleh.

Tabel 1.2 Jumlah Kelurahan, Luas dan Persentase Daerah dan Posisi Geografis Menurut Kecamatan

kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah	Persentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
Guguk Panjang	7	6,831 km ²	27,07	100°, 22" 49" BT 0°, 18" 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12,156 km ²	48,16	100°, 22" 23" BT 0°, 17" 28" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6,252 km ²	24,77	100°, 23" 22" BT 0°, 19" 16" LS
Bukittinggi	24	25,239 km ²	100,00	100°, 22" 03" BT 0°, 17" 08" LS

Sumber : BPS Kota Bukittinggi

Dengan luas 25,239 km² daerah Bukittinggi yang tidak bisa diperluas dan dimekarkan lagi, maka perlu wilayah yang kosong untuk meningkatkan perkembangan Kota Bukittinggi dari sektor formal maupun informal. Dan mampu menunjang perkembangan Kota Bukittinggi .Wilayah Mandiingin Koto Selayan (MKS) . Merupakan wilayah Bukittinggi yang cukup luas dan cukup menampung perkembangan kota karna wilayah ini masih terdapat lahan kosong yang tidak terpakai. Dan bisa di jadikan tempat pembangunan kota yang baik seperti instansi negara , sekolah, bangunan publik dan pemukiman penduduk . Dengan di dukung oleh kebijakan dari Wali Kota dan DPRD Kota Bukittinggi sebagai pemerintahan dari wilayah ini sendiri.

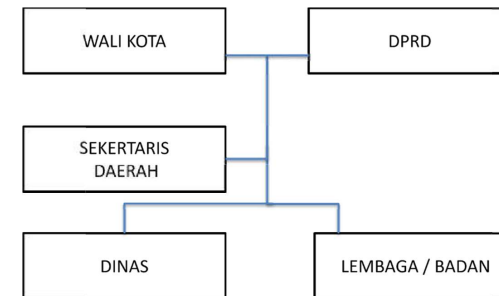



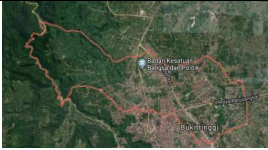
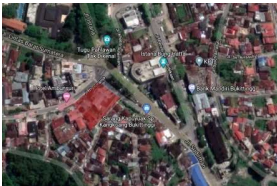

Diagram 1.1 Keorganisasian Pemerintah Kabupaten/Kota

sumber : PP 41/2007

DPRD Kota Bukittinggi merupakan lembaga legislatif yang bergerak di daerah dengan menjalankan tugas tugasnya dengan azas otonomi daerah . Oleh karena itu gedung DPRD dipergunakan sebagai aktifitas kegiatan yang berhubungan dengan dua unsur yaitu lembaga eksekutif dengan masyarakat.Dimana keduanya mempengaruhi tugas dan wewenang dari anggota dewan legislatif . Di Kota Bukittinggi sendiri terdiri dari 25 anggota dewan yang berasal dari 8 partai politik yang bertugas pada priode 2019 - 2024. Yang memiliki tugas dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan seperti membentuk peraturan daerah provinsi serta membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kota bersama dengan Wali kota. (Yudi Prama Agustino,[2019], web: rri.co.id *25 anggota terpilih dilantik dan diambil sumpah*). *DPRD Bukittinggi*

Pemerintah Kota Bukittinggi berupaya membangun gedung DPRD Kota Bukittinggi yang baru . Karena banyaknya terjadi permasalahan pada gedung DPRD Kota Bukittinggi yang lama seperti bangunan yang sudah tua dan tidak bisa lagi menambah luas bangunan pada kantor DPRD, bangunan penunjang, ruangan baru serta infrastruktur yang diperlukan . Dapat kita lihat dari fakta yang ada.Pada penggambaran letak lokasi dapat kita jadikan acuan dan perbandingan .

Tabel 1.3 Penggambaran letak lokasi

NO	KETERANGAN	LOKASI SAAT INI	LOKASI YANG BARU
1.	Kawasan	 Kecamatan Guguk Panjang (6.83)	 Kecamatan Mandiangin Koto Selayan "MKS" (12.68)
2.	Luas	2.533,34 m ²	42,587,79 m ²
3.	Lahan untuk melakukan pembangunan	 Pada sekitar lokasi tidak bisa lagi melakukan pembangunan	 Pada sekitar lokasi masih bisa melakukan pembangunan dan banyak terdapat lahan kosong
4.	Kepadatan penduduk	7.276	4.020
5.	Penyebaran Penduduk (2015-2019)	36.58 , 37.41 , 37.21 37.26 , 36.37	40.82 , 40.36 , 40.56 40.50 , 40.98

sumber : BPS Kota Bukittinggi dan goglemap

Gedung DPRD Bukittinggi yang akan di bangun tidak luput dari jalanya skema perkembangan politik di indonesia . Oleh karena itu DPRD Bukittinggi membutuhkan kebutuhan yang baru untuk menunjang sistem pemerintahan di

Indonesia untuk memajukan daerah Bukittinggi seperti :

1. Luas bangunan yang menampung kegiatan DPRD.
2. Fasilitas penunjang pada gedung saat ini yang tidak terpenuhinya untuk aktifitas bekerja di ruangan.
3. Suasana ruangan yang begitu sempit dan tidak nyaman.
4. Lahan yang begitu sempit dan tidak bisa lagi melakukan perkembangan kegiatan yang akan di adakan sekitar kawasan.

Untuk menunjang itu semua diperlukan tempat dan lokasi yang cocok untuk mawadahi kegiatan politik di wilayah ini dan MKS merupakan wilayah yang tepat sebagai pengembangan wilayah pemerintahan bukittinggi.

Oleh karena itu penulis ingin mengangkat desain kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan bentuk desain geometri. Yang mengangkat dari bentuk pola pola bangunan atau ruangan yang bisa di kaitkan dengan bentuk pola berpikir DPRD yang terorganisasi. Bentuk geometri sendiri merupakan bentuk simetris atau pun asimetris yang persisi yang mengartikan DPRD Kota Bukittinggi yang adil dan bermartabat untuk menjalankan segala tugas dan wewenangnya pada sistem demokrasi.

Dengan bentuk geometri penulis berencana ingin merancang bentuk bangunan DPRD Kota Bukittinggi dengan arsitektur regionalisme yang kaya akan bentuk geometri dan unsur daerahnya dengan mencerminkan wilayah kekuasaan dari daerah tersebut. Pada tahun 2019 pemerintah Kota Bukittinggi akan melaksanakan pembangunan kantor DPRD yang baru, bangunan ini sendiri terletak di daerah Pulai Anak Air Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat. Oleh sebab itu penulis ingin mengangkat judul dari isu yang telah diamati dan melakukan penelitian dengan judul "**Perencanaan kantor DPRD Kota Bukittinggi dengan pendekatan arsitektur regionalisme**"

1.1.1 Data

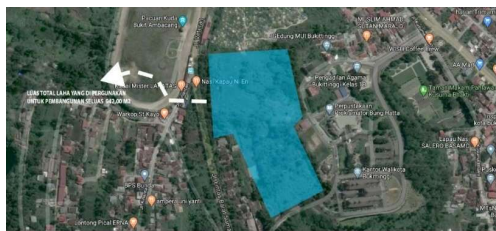
Cakupan pemerintahan Kota Bukittinggi dan wilayah kekuasaan yang di urus oleh wali kota dan DPRD Kota Bukittinggi terdiri dari 3 kecamatan. Yang bisa di lihat pada diagram . Pemindahan kantor ini terletak di Kecamatan Guguak Panjang , kelurahan kayu kubu (1) ke daerah Kecamatan MKS , Kelurahan Kubu Gulai Bancah (3).



Gambar 1.1 batas pemerintahan kota bukittinggi

Sumber : <http://www.bukittinggikota.go.id>

Bangunan DPRD Kota Bukittinggi yang berada di pusat Kota Bukittinggi ini merupakan bangunan lama yang terdiri dari satu lantai dan cakupan luas bangunan sangat sempit . Pada laporan pelaksanaannya telah ditetapkan bahwasanya pembangunan kantor DPRD Kota Bukittinggi akan dilaksanakan pada tahun 2020 ini.



Gambar 1.2 Luas Tanah Yang Digunakan Untuk Pembangunan Kantor DPRD

Sumber : <https://www.google.co.id/>



Gambar 1.3 Luas Site yang akan di bangun

Sumber : Dokumen pribadi



Gambar 1.4 Lanskap kawasan yang akan di gunakan

Sumber : Dokumen pribadi

DPRD Kota Bukittinggi terdiri dari 25 anggota dewan dari 8 kader partai politik yang menjabat diantaranya adalah :

NO	ANGGOTA	PARTAI
1.	5 Orang	Partai Garindra
2.	5 Orang	PKS
3.	4 Orang	Partai Demokrat
4.	4 Orang	Partai Golkar
5.	3 Orang	PAN
6.	3 Orang	PPP
7.	2 Orang	Partai Nasdem
8.	1 Orang	PKB

Tabel 1.4 Anggota DPRD berdasarkan partai terpilih
 sumber : http://rri.co.id/bukittinggi/post/berita/704772/daerah/25_anggota_dprd_

1.1.2 Fakta

Fakta dapat kita kenali dari aspek teknis perencanaan dari yang kita tinjau seperti berikut :

1. Lokasi Sekarang Yang Tidak Baik Lagi

Walikota Ramlan Nurmatias menjelaskan bahwa Kantor DPRD yang ditempati saat ini sudah berumur cukup tua dan tidak lagi kondusif, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat maka dibutuhkan kantor yang representatif, dan wilayah kecamatan Mandiangin Koto Selayan (MKS) merupakan wilayah yang akan dijadikan untuk pengembangan perkantoran pemerintah dan sekolah. Dapat di lihat dari suasana kantor DPRD sekarang.



Gambar 1.5 Tampak depan bangunan DPRD dengan cakupan luas bangunan yang kecil
 Sumber : <https://covesia.com>.



Gambar 1.6 Ruang rapat yang minim pergerakan
 Sumber : <https://minangkabaunews.com>



Gambar 1.7 Tempat parkir yang memakai jalan lintas

Sumber : Dokumen Pribadi

2. Penentuan Lokasi

- Lokasi gedung DPRD
- Lokasi parkir
- Lokasi bangunan sarana dan parasarana penunjang lainnya

Yang menjadi prioritas dalam pembangunan ini adalah lokasi gedung DPRD Kota Bukittinggi .

3. Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Lokasi Gedung DPRD Kota

Bukittinggi :

a) Faktor Primer

- Luas lahan / kawasan yang digunakan
- Letak lokasi yang dituju
- Transportasi publik
- Sumber energi listrik dan air "utilitas"

b) Faktor Skunder

- Hukum dan peraturan
- Iklim dan tanah
- Ketersediaan tenaga kerja
- Sikap masyarakat setempat
- Kemungkinan perluasan lokasi

4. Pertimbangan Penentuan Lokasi

- Dekat dengan pusat pemerintahan
- Tidak terlalu jauh dengan pusat kota
- Menghindari keramaian masyarakat
- Sarana dan pasarana

5. Metode Penilaian Lokasi

• Metode Deskriptif

Metode ini bertujuan untuk mengenal bagaimana gambaran tentang gedung DPRD kota Bukittinggi yang lama tujuannya agar memahami bagaimana kelayakan pada gedung DPRD yang lama karna tuntutan fungsi dan kegunaan ruangan gedung DPRD yang semakin hari semakin sempit.

• Metode Dokumentatif

Metode ini bisa berupa permintaan data pada instansi atau lembaga yang terkait dengan penelitian yang saya buat berupa gambar atau file data yang berhubungan dengan kajian masalah tersebut .

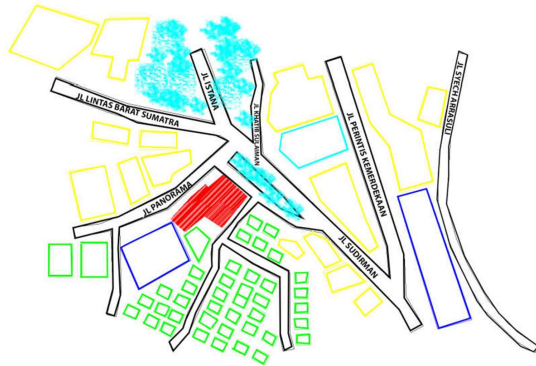
• Metode Komparatif

Merupakan perbandingan atau tolak ukur dari sebuah data yang peneliti amati.

6. Luas Kawasan / Lokasi

Luas kawasan pada pembagunan yang akan digunakan seluas 42,587,79 m² . dengan pembagian ke 3 aspek lokasi yang menjadi prioritas pertama lokasi gedung DPRD ,bangunan sarana penunjang dan lokasi parkir.sedangkan luas lokasi sekarang 2.533,34 m² cuman mencakup gedung DPRD dan tidak adanya vasilitas pendukung sekitar kawasan bangunan.

7. Tata Letak Layout Kawasan



Gambar 1.7 Layout lokasi kantor DPRD sekarang

Sumber : Dokumen Pribadi

- = Pemukiman dan perumahan
- = Bangunan pemerintahan
- = Bangunan jasa dan perdagangan
- = Vegetasi , bangunan publik dan fasilitas publik
- = Lokasi dan kawasan

Bisa dilihat dari layout lokasi bahwasanya gedung DPRD Kota Bukittinggi tidak baik untuk melaksanakan tugas pemerintahan . Karena lokasi merupakan tempat aktifitas masyarakat dan khalayak ramai.

8. Bahan dan teknologi

Pada gedung DPRD sekarang ini gedungnya sendiri sudah berumur cukup tua . Pada gedung ini juga telah banyak melakukan renovasi sehingga bahan pada bangunan tersebut sudah tidak asli lagi . Oleh karena itu pemerintah berupaya melakuka perencanaan pembagunan gedung DPRD Kota Bukittinggi yang baru . Dengan penggunaan bahan dan teknologi yang baru untuk memperoleh gedung DPRD yang menungjang segala aktifitas dan pelaksanaan tugas dan wewenang negara .

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Permasalahan Arsitektural

1. Kondisi pada gedung DPRD sekarang sudah berumur dan tidak kondusif lagi.
2. Jumlah ketersediaan ruang yang ada di gedung DPRD kota Bukittinggi terbatas sehingga membutuhkan ruangan baru .
3. Tidak dapat menambah fungsi baru yang ada di gedung DPRD.
4. Lahan parkir pada kawasan cukup sempit dan berada dekat dengan jalan .
5. Perlunya pembagunan bangunan penunjang pada kawasan .
6. Perlunya pembagunan sarana prasarana dan invrastruktur .
7. Terlalu dekat dengan pusat keramaian , pusat ekonomi dan wisata .

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya DPRD Kota Bukittinggi sendiri harus membutuhkan bangunan, sarana dan prasarana yang baru dan layak untuk menuang tugasnya dalam amanat rakyat yang telah di emban . Oleh karena itu DPRD Kota Bukittinggi membutuhkan wadah baru. Sehingga DPRD Kota Bukittinggi bisa mewujudkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga negara . dengan asas yang dijalankan :

- a.Kepastian hukum
- b.Keterbukaan
- c.Akuntabilitas
- d.Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal Daerah/Negara.
- e.Kebersamaan
- f.Efisiensi berkeadilan
- g.Berkelanjutan
- h.Berwawasan lingkungan
- i.Kemandirian
- j.Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

1.2.2 Permasalahan Non Arsitektural

Pada permasalahan non arsitektural ini kita harus mengetahui dahulu bagian tugas pokok , fungsi dan administrasi DPRD sendiri diantaranya adalah

Tugas

Menyelenggarakan adminitrasi kesekretariatan, admistrasi keuangan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan, dan menyediakan serta mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Fungsi:

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD.
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD.
- Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD.
- Pelaksanaan penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Diagram 1.2 Bagan admistrasi sekretariat DPRD

Sumber : www.blitarkab.go.id

DPRD sebagai wadah yang menampung segala permintaan masyarakat terkait dengan keluhan, pemecahan masalah, sosial, budaya dan opini masyarakat lainnya terhadap kepentingan pribadi/kelompok masyarakat. DPRD sebagai lembaga negara yang menjalankan otonomi daerah yang dibantu dengan dinas-dinas yang terkait. Perlu melaksanakan tugasnya dengan membutuhkan kinerja dan aktifitas yang produktif. Oleh karena itu DPRD Kota Bukittinggi membutuhkan gedung dan ruang lingkup yang luas untuk mendokrak kinerja anggota DPRD Kota Bukittinggi untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pelaksanaan kegiatan.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tercapainya produk hukum yang berkualitas dan berpihak pada rakyat.
2. Peningkatan kualitas kesehatan bagi Anggota DPRD.
3. Tercapainya pelayanan yang lebih optimal.
4. Peningkatan kinerja dan etos kerja karyawan.
5. Menyediakan referensi, informasi data yang lebih lengkap dan akurat.
6. Menciptakan suasana kondusif antara legislative dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.4 Sasaran Penelitian

1. Tercapainya Peningkatan pengetahuan dan wawasan.
2. Tercapainya produk DPRD yang berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan.
4. Meningkatkan dedikasi dan etos kerja karyawan.
5. Peningkatan produktifitas kerja.
6. Tersedianya program kerja.
7. Tersedianya referensi, informasi data yang dibutuhkan secara lengkap dan akurat
8. Terciptanya suasana yang kondusif antara legislative dan eksekutif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

1.5.1 Ruang Lingkup Spasial

Kantor DPRD yang terletak di Jl. Imam Bonjol No.17, Bukit Cangang Kayu Ramang, Kec. Guguk Panjang, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat. Pada bangunan DPRD yang terletak di pusat kota bukittinggi. Dengan kondisi yang tidak dimungkinkan lagi untuk menjang tugas dan menunjang pekerjaan maka pemerintahan kota Bukittinggi berencana memindahkan lokasi gedung DPRD Kota Bukittinggi. Dengan cakupan kawasan yang lebih luas dan masih bisa melakukan pengembangan fungsi lahan. Kantor DPRD kota Bukittinggi yang baru ini sendiri terletak di daerah Jl.Veteran Kubu Gulai Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi Sumatera Barat.

1.5.2 Ruang Lingkup Substansial

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memiliki batasan kegiatan dan ruang lingkup kegiatan penelitian yang akan dibahas yaitu :

1. Melakukan survey ke lokasi sesuai ruang lingkup perencanaan bangunan.
2. Rumusan masalah yang telah ditetapkan.
3. Menganalisis masalah yang ada pada bangunan / kawasan yang akan di bangun.
4. Menganalisis data yang di peroleh.
5. Perumusan konsep desain untuk perencanaan.

1.6 Keaslian Usulan Judul

Keaslian judul dapat kita lihat dengan adanya masalah pada sebuah bangunan lama dimana kegunaan dan fungsi bangunan DPRD kota Bukittinggi tidak efektif lagi untuk melakukan pekerjaan. dan di dorong dengan adanya isu pemindahan gedung DPRD ke kawasan yang baru. Dapat kita tinjau dari beberapa tabel dibawah ini :

10 KARYA TULIS KANTOR DPRD

No	DISAINE KANTOR DPRD	NAMA	TAHUN	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	Bojonegoro https://media.neliti.com/media/publications/131127-ID-arsitektur-perilaku-desain-dprd-bojonego.pdf	Arcadius Mahatma Nuragadikara , Wawan Ardiyan Suryawan	2016	Arsitektur Perilaku : Desain DPRD Bojonegoro	Menceritakan perilaku dan aktifitas dari pengguna gedung untuk bekerja dengan lebih efektif, efisien, sehingga aspek transparansi hasil kinerja dapat tercapai. Hal ini dicapai dengan permainan material, pola ruang dan bentuk desain yang disesuaikan dengan aspek psikologis pengguna.
2.	Kabupaten Padang Pariaman http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id	Abdul Naser	2016	Perencanaan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman	Membahas tentang perancangan dan perencanaan gedung DPRD dengan pendekatan metafora untuk menciptakan sistem demokrasi yang baik dan berdaulat.
3.	Kota Manado https://media.neliti.com/media/publications/89642-ID-arsitektur-venturi-terhadap-gedung-kantor.pdf	Wilma O.E.N. Walangitan	2010	Arsitektur Venturi Terhadap Gedung Kantor DPRD Kota Manado	Melalui karya arsitektural Venturi ditemukan karakteristik ciri khas bentuk perancangan arsitektur Venturi yaitu penerapan atau implementasi teori " Less is Bore" dalam penerapan kepada pembangunan gedung DPRD Kota Manado dalam penekanan karakteristik arsitektur .

4.	Propinsi Kalimantan Tengah http://digilib.isi.ac.id/id/eprint/243	IH Nurcahyadi Nurcahyadi	2002	Perancangan Interior Ruang Sidang Utama Gedung DPRD Propinsi Kalimantan Tengah	Bagunan gedung DPRD Propinsi Kalteng melakukan pembenahan pada ruang dalam yang formil dan mempunyai kesan berwibawa sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan dengan pertimbangan kriteria disain serta mengacu pada aspek kenyamanan, keamanan dan keserasian
5.	Kabupaten Gresik http://repository.untag-sby.ac.id/1306/1/ABSTRAK.pdf	Khudzaifi Ahmad Alawi	2018	Relokasi Gedung DPRD Kabupaten Gresik	Gedung DPRD Kabupaten Gresik yang saat ini digunakan merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang dilindungi pemerintah, termasuk larangan merubah fisik bangunan, sehingga dalam menunjang kegiatan anggota dewan DPRD Kabupaten Gresik saat ini sudah tidak memadai.oleh karena itu pemerintah berupaya melakukan relokasi ketempat yang baru.
6.	Kabupaten Bekasi https://adoc.tips/kantor-pemerintah-kabupaten-dan-dprd-bekasi-penekanan-desain.html	Agus Suryono	2001	Kantor Pemerintah Kabupaten Dan DPRD Bekasi (Penekanan Desain Arsitektur Regionalisme)	Pembangunan gedung DPRD Dengan pendekatan Regionalisme , Regionalisme adalah suatu gerakan dalam arsitektur yang menganjurkan penampilan bangunan yang merupakan hasil senyawa dari internasionalisme dengan pola kultural dan teknologi modern dengan akar, tata nilai dan nuansa tradisi yang masih di anut oleh masyarakat setempat.

7.	Kabupaten Sukoharjo https://onsearch.id/Record/IOS2728.15272/Details	<u>Hartanto, Brilliantony</u>	2006	Redesain Gedung DPRD Kabupaten Sukoharjo Penekanan Pada Penerapan Arsitektur Modern Pada Penampilan Bangunan	Konsep perencanaan redesain gedung DPRD Sukoharjo adalah berdasarkan fungsi dan sifat dari lembaga DPRD yang terbuka, transparan dan berwibawa yang diterapkan dalam bahasa arsitektur untuk menghasilkan suatu bangunan yang menggambarkan sebuah kantor DPRD yang berkesan terbuka untuk masyarakat luas, namun tetap berwibawa.
8.	Kabupaten Sleman http://eprints.uty.ac.id/3205/	Wulansari	2019	Pembangunan Gedung DPRD Kabupaten Sleman Dengan Pendekatan Arsitektur Hemat Energi.	<p>1) material alami seperti kayu digunakan sebagai material pelapis lantai dan plafon.</p> <p>2) penggunaan VRV System sebagai penghawaan dan lampu sensor gerak sehingga dapat menghemat penggunaan listrik.</p> <p>3) penggunaan kran air sensor pada toilet sebagai upaya penghemat air dan listrik.</p> <p>4) grey water sebagai water re-use yang nantinya digunakan untuk fire protection</p> <p>5) green roof diterapkan sebagai penengulangan terhadap strom water, peredam suara dan penurunan suhu ruang dibawahnya. Sebagai identitas bangunan di Sleman bentuk atap Joglo digunakan hasil.</p> <p>6) penerapan RTH untuk memaksimalkan lahan hijau.</p>

9.	Pematang Siantar http://ejournal.uajy.ac.id/4223/1/OTA11381.pdf	Roni Muara Destar Pangaribuan	2018	Gedung DPRD Multiguna Pendekatan Asitektur Tradisional Budaya Batak Dan Budaya Melayu Di Pematang Siantar	Membahas pada pemecahan masalah atas kebutuhan kota Pematangsiantar, khusus nya, pada memfasilitasi masyarakat dalam bentuk bangunan atau ruang (wadah) Gedung DPRD Multiguna. Yang memberikan Kenyamanan, secara visual, kesatuan ruang dan kemudahan akses.baik dalam mau pun luar ruang bangunan.sesuai dengan konsep dasar perancangan ruang publik dan sesuai etika etnik Batak.
10.	Kota Padang http://www.ejurnal.bunghatta.ac.id	Sandra Dinata	2019	Perencanaan Kantor DPRD Kota Padang Dengan Pendekatan Bioklimatik Design	Menjadikan kantor DPRD kota padang sebagai pembentuk elemen utama, pembentuk kota memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan hidup dan kondisi social masyarakat kita. Memakai pendekatan arsitektur bioklimatik dapat membantu meujudkan dan bahkan mendorong cara hidup yang berkelanjutan, yang menojolkan bentukan monumental pada pangunan yang beribawa ke pada bangunan itu sendiri.

Tabel.1.5 Contoh judul desain kantor DPRD

7 KARYA TULIS DISAINE REGIONALISME

NO	DESAIN	NAMA	TAHUN	JUDUL	PEMBAHASAN
1.	HOTEL RESORT DI KAWASAN WISATA MANDEH,	Ryandhika Ruddy Farel	2017	APLIKASI ARSITEKTUR REGIONALISME PADA PERANCANGAN HOTEL RESORT DI KAWASAN WISATA MANDEH, SUMATERA BARAT	Perancangan bangunan Resort Hotel ini menggunakan pendekatan Arsitektur Regionalisme, dimana penggunaan pendekatan ini bertujuan untuk menampilkan ciri khas budaya Sumatera Barat kepada wisatawan, serta sebagai cara untuk mempromosikan pariwisata Sumatera Barat keluar, dengan bentuk yang unik diterapkan pada bangunan diharapkan desain Resort Hotel ini menjadi sesuatu yang unik dan menjadi pembeda dari wadah penginapan lainnya sehingga pariwisata di Sumatera Barat dapat terus berkembang
2.	HOTEL KONTEMPORER DI YOGYAKARTA	Alfia Suci Rohmawati*	2018	IDENTIFIKASI PENDEKATAN REGIONALISME DALAM ARSITEKTUR HOTEL KONTEMPORER DI YOGYAKARTA	Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa indikasi pendekatan regionalisme telah dapat teridentifikasi dalam arsitektur bangunan hotel kontemporer di Yogyakarta. Sebanyak 5 dari 7 objek yang diamati menunjukkan kecenderungan pendekatan regionalisme yang masih berfokus pada pembentukan asosiasi terhadap aspek kultural dan historis. Sementara 2 objek lainnya, yaitu Hotel Greenhost dan Hotel Grand Aston telah menunjukkan indikasi pendekatan regionalisme kritis, meskipun keduanya berfokus pada aspek nilai lokal yang berbeda. Desain Hotel

					Greenhost tampak berfokus pada respon terhadap konteks iklim lokal, sementara Hotel Grand Aston berkonsentrasi pada respon terhadap keselarasan bangunan terhadap kawasan lingkungan sekitarnya. Meskipun demikian, terkait keterbatasan data yang terkait dengan konsep perancangan hotel-hotel tersebut, maka identifikasi keberadaan indikasi regionalisme kritis ini belum dapat dijadikan sebagai acuan penilaian secara utuh.
3.	HOTEL SPA INTERNASIONAL	Shabrina Adani	2016	HOTEL SPA INTERNASIONAL DI BALI DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR REGIONALISME	Penerapan Arsitektur Regionalisme pada bangunan Hotel Spa di Bali dikhususkan kepada unsur-unsur fisik bangunan dengan menggunakan pendekatan regionalisme secara konkrit. Permasalahan arsitektural yang diselesaikan oleh regionalisme adalah perulangan, tapak, dan bentuk. Desain bangunan Hotel Spa yang memiliki unsur filosofi <i>tri angga</i> pada bentuk massa
4.	ARSITEKTUR NUSANTARA	Maria I Hidayatun	2012	ARSITEKTUR NUSANTARA SEBAGAI DASAR PEMBENTUK REGIONALISME ARSITEKTUR INDONESIA	Regionalisme Arsitektur merupakan sebuah konsep dalam mengkinikan arsitektur Nusantara yang dinilai tepat karena parameter di dalam arsitektur Nusantara sejalan dengan parameter dalam regionalisme Arsitektur. Sehingga arsitektur Nusantara merupakan dasar pembentuk Regionalisme Arsitektur

					Indonesia yang bertujuan untuk mengkinikan arsitektur Nusantara sebagai sebuah kekayaan dan kekuatan yang sarat dengan nilai dan makna. Tanpa nilai dan makna maka arsitektur hanya sebuah artefak yang tidak mempunyai arti.
5.	ARSITEKTURAL APARTEMEN DI BALI	Hana Maliantha Gunawan	2017	KOMPONEN DESAIN ARSITEKTURAL APARTEMEN DI BALI BERDASARKAN PENDEKATAN REGIONALISME KRITIS	Dari hasil analisis ditemukan bahwa pada objek De Lagoon Residence terlihat lebih banyak komponen desain yang sesuai dengan Hubungan Fungsional dibandingkan dengan Clio Apartment. Akan tetapi ditemukan pula bahwa pada kasus studi masih terdapat kekurangan pada keempat Hubungan Fungsional. Kekurangan dari bentuk bangunan terdapat pada prinsip bentuk bangunan yang tidak sesuai dengan proporsi arsitektur tradisional Bali dan tidak adanya penggunaan susunan paviliun
6.	YOUTH CENTER DI KABUPATEN MAGELANG	Risya Agus Arifah	2015	YOUTH CENTER DENGAN PENDEKATAN ARSITEKTUR REGIONALISME DI KABUPATEN MAGELANG	Pada bangunan Youth Center ini, konsep Arsitektur Regionalisme diterapkan dengan penggunaan bentuk yang mengambil dari bentuk dasar Candi Borobudur, tata pola massa terpusat dan seimbang seperti pada Candi Borobudur

7.	GALERI SENI DI YOGYAKARTA	Marchelia Gupita Sari	2019	PENERAPAN PRINSIP REGIONALISME PADA ARSITEKTUR GALERI SENI DI YOGYAKARTA	Secara umum jika dikaitkan dengan prinsip-prinsip regionalisme dalam arsitektur, pada kasus terpilih menunjukkan ditemukan adanya usaha untuk pengolahan elemen arsitektural yang tidak selalu berorientasi pada faktor budaya dan kesejarahan dalam suatu tempat. Konteks lingkungan dan integrasi antara ruang dalam dan ruang luar merupakan Untuk dikatakan sebagai bangunan yang menerapkan regionalisme kritis, perlu suatu <i>assessment</i> yang lebih objektif karena parameter di prinsip-prinsip regionalisme kritis bersifat kualitatif
----	---------------------------	-----------------------	------	--	---

Tabel.1.6 Contoh judul desain Modern

1.7.Sistematika Pembahasan

1. BAB I PENDAHULUAN

Merupakan awalan atau lampiran dalam pembuatan laporan yang terdiri dari beberapa pokok bahasan yang berkaitan dengan data dan seluruh informasi yang terkait dengan penelitian.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

merupakan ladasan dan teori yang berlaku dalam pembuatan laporan.

3. BAB III METODA PENELITIAN DAN PERANCANGAN

Berisikan sasaran penelitian dan metode yang digunakan dalam penelitian baik dari sumber maupun narasumber yang berada di suatu lokasi amatan .

4. BAB IV TINJAUAN KAWASAN PERENCANAAN

Merupakan data yang terkait dengan topik bahasan.

5. BAB V ANALISA

Berisikan tentang analisis , kebutuhan dan zoning yang ada pada objek amatan.

6. BAB VI KONSEP

Berisikan sumber dan pedoman dalam pembuatan sebuah laporan.

1.8.Alur Pikiran

